

Efektivitas Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan di Desa Muara Sungai

Elsa Anggraini

Administrasi Publik, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia
email: anggrainielsa679@gmail.com

Abstract

Village development requires active community involvement to ensure that the results are sustainable, effective, and aligned with local needs. However, in practice, the level of community participation in some villages remains suboptimal, including in Muara Sungai Village. This situation raises issues related to low community engagement, a lack of transparency in information, and the limited capacity of village officials to manage development programs. This study aims to analyze the role of the Muara Sungai Village Government in encouraging community participation in village development. This study employs a descriptive qualitative method using data collection techniques such as observation and documentation. Theoretically, this study draws on the concept of the village government's role as a facilitator, motivator, and coordinator, as well as theories of community participation in development. The research findings indicate that the Muara Sungai Village Government has fulfilled its role by facilitating development activities, providing motivation to the community through participatory leadership, open communication, and a culture of mutual cooperation. The obstacles encountered include low community awareness, a lack of transparency in information dissemination, and limited capacity of village officials. The discussion of this study emphasizes the importance of increasing transparency, expanding participatory forums, and strengthening the capacity of village human resources. A village government approach that is responsive, innovative, and oriented toward local needs is believed to improve the quality of development and encourage the community to contribute more actively in every stage of planning and implementation.

Keywords: *Effectiveness, Community Participation, Village Development, Village Government*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Menurut Mahmudi (dalam Ramadhona, M., & Sahuri, C., 2017) Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar

kontribusi (sambungan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan tersebut. Sehubungan dengan pendapat tersebut bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antar output dengan tujuan. Dan semakin besar kontribusi output maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Purnamasari, H., et al (2016) menurut Emerson Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan disetiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti telah ditentukan. Definisi ini menekankan aspek pencapaian tujuan dan efisiensi internal. Efektivitas pemerintah secara umum didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan suatu pemerintahan dalam mencapai tujuan, sasaran, dan mandat kebijakan yang telah ditetapkan, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Yazid, Y., & Alhidayatillah, N. (2017) menurut Isbandi (2007) Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi, pemilihan solusi, pelaksanaan upaya penanganan masalah, dan keterlibatan dalam proses lainnya yang memengaruhi kehidupan mereka. Oakley, P. (1991), Oakley mengidentifikasi beberapa indikator partisipasi, meliputi kontribusi, pengorganisasian, peran dan aksi masyarakat, motivasi, dan tanggung jawab masyarakat. Partisipasi masyarakat didefinisikan secara beragam oleh para ahli, namun umumnya menekankan pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil dari suatu kegiatan atau pembangunan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 (Pamungkas, B. A. 2019).

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa (yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Desa dan Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun atau sebutan lain) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Atau dengan kata lain, mereka yang bertugas untuk mengatur dan melaksanakan pemerintahan di tingkat desa yang dikepalai oleh Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau desa. Sehingga antara Kepala Desa selaku pemerintah desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan/organisasi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, walaupun keduanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, tetapi mempunyai hubungan yang erat dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, sebagaimana PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 (Salimi, A.A. 2024).

Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur rumah tangga desa, dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkatnya. Pentingnya gaya kepemimpinan kepala desa yang partisipatif. (Nurhayati, N., Wijaya, M. H., & Minan, J. 2024) Kepala desa yang mampu mendengarkan aspirasi warga, melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan menjadi teladan dalam kegiatan sosial terbukti dapat meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Kepemimpinan yang kolaboratif juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa .

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan beberapa warga, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah. Kepala Desa menyebutkan bahwa sosialisasi program sudah dilakukan, tetapi banyak warga tidak hadir dalam musyawarah karena kesibukan dan kurangnya minat. Warga juga mengakui bahwa informasi sering terlambat diterima dan pendapat mereka jarang didengar karena rapat lebih banyak diikuti tokoh tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun upaya pemerintah desa sudah ada, komunikasi yang kurang efektif dan dominasi beberapa tokoh membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Pembangunan desa merupakan bagian penting dalam sistem pembangunan nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif. Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Yustisia, T. V. 2015)

Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Menurut Suryono (dalam Yuliyanto, I. M., & Winarni, A. T. 2022) partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan. Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada.

Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang diatur dalam pasal 24 tersebut adalah asas partisipatif, yakni adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa. Adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan demokrasi yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang (Hsb, M. O. 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bisa disimpulkan sedikit yang ikut berpartisipasi karena masyarakat memiliki kesibukan masing-masing seperti warga bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga waktu dan energi untuk berpartisipasi dalam musyawarah sering kali terbatas. Dan dari masyarakat lainnya mengatakan bahwa sudah ikut berpartisipasi tetapi jika ada saran yang disampaikan sering kali tidak di dengar maka dari pengalaman itulah mereka kebanyakan enggan partisipasi karena merasa tidak dihargai.

Penelitian ini didasarkan pada teori dikemukakan oleh Richard M. Steers, mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokok atau mencapai semua sasarnya, dimana dijelaskan bahwa dalam efektivitas digolongkan dalam 3 (tiga) model, yaitu Model Optimasi Tujuan, Prespektif Sistem, Tekanan pada Perilaku. Adapun teori menurut Richard M Steers (Putri,B.Y. et al 2023), menjelaskan bahwa efektivitas digolongkan dalam 3(tiga) model, yaitu :

1. Model optimis tujuan, Penggunaan model optimis bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat. Organisasi desa yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda dalam hal pembangunan masyarakat. Oleh karena itu, nilai keberhasilan atau kegagalan pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat harus ditentukan dengan membandingkan hasil-hasil partisipasi masyarakat dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Prespektif sistem, Prespektif ini memusatkan perhatian pada hubungan antara berbagai kompoen baik yang ada didalam maupun ada diluar organisasi pemerintah desa. Setiap komponen berkontribusi secara bersama-

sama terhadap keberhasilan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, model ini menekankan pentingnya memahami hubungan sosial antarpemerintah desa dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif.

3. Tekanan pada perilaku, Dalam model ini, efektivitas pemerintah desa diukur dari hubungan antara tujuan pemerintah dan harapan masyarakat. Jika keduanya sejalan, kemungkinan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi lebih besar. Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas yang telah dijelaskan, maka efektivitas dapat diartikan sebagai tercapainya tujuan atau hasil kegiatan terkait partisipasi masyarakat yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara partisipasi yang dihasilkan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan Desa Muara Sungai untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya pemerintah desa mendorong partisipasi masyarakat pada pembangunan Desa Muara Sungai. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Efektivitas Pemerintah Desa dalam mendorong partisipasi masyarakat merupakan faktor krusal dikaji lebih mendalam. Mengingat masih rendahnya partisipasi masyarakat di desa Muara Sungai, maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk dapat menggali informasi secara mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Efektivitas dari Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Desa Muara Sungai. Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Sungai pada tanggal 19-20 November 2025. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Richard M Steers (1985:208-209), yang terdiri dari 3(tiga) dimensi, yaitu Model optimal tujuan, Prespektif sistem, Tekanan pada perilaku.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Purposive Sampling*, adapun informan yang digunakan dalam penelitian seperti Kepala Desa, Aparat Desa, dan Masyarakat. Teknik pengumpulan data ialah untuk memperoleh informasi atau fakta yang relevan dari objek penelitian, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan melakukan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Model Optimasi Tujuan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa berupaya untuk mencapai tujuan pembangunan partisipatif melalui berbagai langkah, seperti melakukan sosialisasi program serta melaksanakan musyawarah desa sebagai wadah perumusan kegiatan bersama. Namun, realitas dilapangan memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat masih rendah. Banyak warga tidak hadir dalam musyawarah, baik karena faktor kesibukan, kurangnya minat, maupun karena mereka merasa kegiatan desa tidak memberikan dampak langsung bagi kebutuhan mereka. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa meskipun mekanisme partisipasi telah disediakan, penggunaannya belum optimal dan belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat secara aktif.

Jika ditinjau menggunakan model optimasi tujuan, efektivitas pemerintah desa dievaluasi berdasarkan sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan pembangunan desa. Namun adanya kesenjangan antara target yang ingin dicapai dan realisasi partisipasi yang terjadi menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum tercapai secara maksimal. Kesenjangan ini menandakan bahwa efektivitas pemerintah desa muara sungai dalam mendorong partisipasi masih perlu diperkuat melalui perbaikan strategi komunikasi, peningkatan penyadaran masyarakat, dan penciptaan ruang partisipasi yang lebih inklusif.

Lebih lanjut, rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat juga mencerminkan bahwa proses perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana prinsip pembangunan partisipatif yang mengutamakan kontribusi dan aspirasi warga. Partisipasi yang minim dapat menghambat pencapaian pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, karena perencanaan yang tidak melibatkan warga secara baik berpotensi menghasilkan program yang kurang relevan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk meninjau kembali efektivitas metode yang digunakan dalam menjangkau partisipasi, agar tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih baik dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam upaya mengoptimalkan partisipasi masyarakat, pemerintah desa muara sungai perlu mengimplementasikan pendekatan berbasis data yang memfokuskan pada analisis kebutuhan masyarakat secara mendalam. Data yang akurat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan aspirasi warga akan membantu pemangku kebijakan dalam merumuskan program yang benar-benar relevan dan bermanfaat. Jika masyarakat merasa bahwa proyek yang direncanakan selaras dengan kebutuhan mereka, kemungkinan besar partisipasi meningkat. Oleh karena itu, evaluasi terus-menerus terhadap program yang telah dilaksanakan menjadi sangat penting untuk memahami dampak dan efektivitasnya. Pemerintah desa muara sungai harus mengembangkan sistem evaluasi partisipasi yang melibatkan umpan balik langsung dari masyarakat, sehingga mereka dapat merasa memiliki peran aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, pemerintah desa muara

sungai tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendengarkan dan merespon suara masyarakat, sehingga tujuan pembanguna yang partisipatif dapat tercapai secara maksimal.

Model optimasi tujuan menilai sejauh mana organisasi mampu merumuskan, memprioritaskan, dan mencapai tujuan secara efektif melalui proses pengambilan keputusan yang sistematis. Berdasarkan kajian teoritis dan hasil temuan lapangan, indikator seperti kejelasan tujuan, konsistensi perencanaan, ketersediaan data pendukung, dan kemampuan evaluasi menjadi dasar dalam menerapkan model optimasi tujuan. Namun, kapasitas analitis aparatur dalam mengoperasionalkan indikator-indikator tersebut masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan temuan beberapa studi, seperti yang dijelaskan oleh Nugraha (2022), bahwa implementasi model optimasi sering terhambat oleh rendahnya pemahaman teknis terhadap metode analisis tujuan dan minimnya keterampilan dalam mengolah data, sehingga proses perencanaan dan pengambilan keputusan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip optimasi yang ideal.

Perspektif Sistem

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat muara sungai dalam pembangunan desa tidak dapat dilihat secara terpisah dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas. Sistem pembangunan desa muara sungai terdiri dari berbagai komponen yang berinteraksi, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan jaringan sosial yang ada. Setiap komponen memiliki peran tertentu dan mempengaruhi satu sama lain.

Dalam kasus rendahnya partisipasi masyarakat muara sungai, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa faktor sistemik yang menghambat keterlibatan aktif warga. Misalnya, adanya ketidakharmonisan antara kebijakan pemerintah desa muara sungai dan kondisi dilapangan. Sosialisasi program yang dilakukan belum cukup efektif, karena tidak mempertimbangkan cara penyampaian informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika dialog antara pemerintah dan warga tidak terbuka dan transparan, masyarakat akan merasa terasing dari proses pembangunan.

Sistem juga mencakup norma dan nilai masyarakat yang ada. Ketika masyarakat melihat bahwa hanya tokoh tertentu yang terlibat dalam muyawarah, maka kepercayaan terhadap sistem tersebut akan berkurang. Hal ini berpotensi menciptakan sikap apatis dikalangan masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pemerintah desa muara sungai dalam mendorong partisipasi, perlu untuk merombak paradigma komunikasi dan yang ada, menjadikan setiap warga sebagai bagian integral dari proses pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat muara sungai, pemerintahan desa perlu menganalisis lebih dalam mengenai mekanisme komunikasi yang ada. Salah satu masalah yang muncul adalah kurangnya saluran interaksi yang efektif antara pemerintah desa dan masyarakat. Jika pemerintah desa tidak secara aktif melibatkan semua lapisan masyarakat dalam

proses perencanaan, hal ini dapat menyebabkan pengucilan yang lebih luas. Ketidakterlibatan masyarakat muara sungai dalam dialog dapat berpotensi menciptakan gap yang lebih besar antara kebijakan pembangunan yang ditetapkan dan kebutuhan ril masyarakat.

Dalam konteks sistem ini, keberhasilan pembangunan partisipatif sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa muara sungai untuk menciptakan jembatan komunikasi yang inklusif, dimana semua suara didengar dan dipertimbangkan. Dengan merangkul setiap lapisan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat, dan masyarakat pun lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif.

Kast dan Rosenzweig (1972) menjelaskan bahwa pendekatan sistem memungkinkan manajer untuk memahami kompleksitas organisasi melalui identifikasi hubungan antar bagian, serta pengaruh lingkungan eksternal terhadap kinerja internal. Sejalan dengan itu, Seddon (2008) menegaskan bahwa perspektif sistem berperan penting dalam meningkatkan efisiensi layanan publik dengan menitikberatkan pada pengelolaan proses secara menyeluruh, bukan sekadar optimalisasi bagian secara parsial.

Tekanan pada Perilaku

Dari hasil wawancara yang didapat tekanan yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan yaitu banyak warga muara sungai yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga waktu dan energi untuk berpartisipasi dalam musyawarah sering kali terbatas. Nilai sosial dalam masyarakat dapat memengaruhi seberapa besar warga muara sungai merasa memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam budaya dimana keputusan lebih didominasi oleh tokoh tertentu, mereka merasa bahwa pendapat mereka tidak akan didengar dan memilih untuk tidak berpartisipasi. Warga sering kali dipengaruhi oleh pandangan teman, keluarga, dan komunitas sekitar mereka, jika dilingkungan mereka tidak ada dorongan untuk terlibat dalam pembangunan, individu cenderung mengikuti arus dan enggan untuk tampil berbeda. Dukungan dan pengaruh dari tokoh masyarakat sangat penting dalam mendorong partisipasi, Ketika tokoh yang diakui menghargai semua saran dari warga, akan ada dorongan bagi masyarakat muara sungai untuk lebih aktif terlibat.

Selain faktor-faktor yang telah disebutkan, sikap dan perilaku individu dalam masyarakat muara sungai juga sangat dipengaruhi oleh sejarah partisipasi sebelumnya. Jika dimasa lalu warga merasa bahwa keterlibatan mereka tidak memberikan dampak berarti atau tidak dianggap serius, maka motivasi mereka untuk berpartisipasi dimasa mendatang dapat menurun. Oleh karena itu, menciptakan pengalaman positif melalui proyek yang berhasil dan berdampak langsung bagi masyarakat bisa menjadi strategi yang efektif. Ketika masyarakat melihat hasil nyata dari partisipasi mereka, baik dalam bentuk peningkatan

fasilitas umum maupun program yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, hal ini berpotensi merangsang partisipasi yang lebih tinggi dimasa mendatang.

Selain itu, penting bagi pemerintah desa muara sungai untuk memberikan penghargaan atau pengakuan kepada individu atau kelompok yang aktif berpartisipasi. Dengan memberikan penghargaan yang eksplisit, diharapkan dapat merangsang minat dan memotivasi warga untuk terlibat secara aktif pada pembangunan, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah desa muara sungai dan masyarakatnya.

Dengan mengoptimalkan perspektif sistem dan memahami tekanan pada perilaku, pemerintah desa muara sungai dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai secara lebih maksimal.

Tekanan atau tekanan situasional (pressure) dipahami sebagai faktor eksternal atau internal yang memengaruhi cara individu bertindak dalam suatu lingkungan kerja. Tekanan ini dapat berupa tuntutan waktu, target kinerja, konflik peran, atau ekspektasi organisasi yang tinggi. Menurut Robbins dan Judge (2019), tekanan yang berlebihan dapat menyebabkan stres kerja, penurunan produktivitas, bahkan perilaku disfungsional seperti manipulasi informasi atau pengambilan keputusan yang tidak etis.

Tabel 1. Analisis Efektivitas Pemerintah Desa dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat

Dimensi Efektivitas (Steers)		Bentuk Upaya Pemerintah Desa	Kondisi Partisipasi Masyarakat	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Model Tujuan	Optimasi	Sosialisasi program dan pelaksanaan musyawarah desa	Kehadiran warga dalam musyawarah masih rendah	Kesibukan warga, kurangnya minat	Adanya forum resmi desa
Perspektif Sistem		Penyampaian informasi pembangunan dan koordinasi dengan masyarakat	Aspirasi warga belum sepenuhnya terakomodasi	Transparansi informasi masih terbatas	Hubungan sosial antarwarga cukup baik
Tekanan Perilaku	pada	Motivasi melalui ajakan gotong royong dan kepemimpinan partisipatif	Keterlibatan aktif masih didominasi tokoh tertentu	Budaya pasif dan rendahnya kepercayaan	Budaya gotong royong mulai berkembang

Sumber: Olahan Peneliti di Desa Muara Sungai (2025)

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat Desa Muara Sungai dalam proses pembangunan merupakan persoalan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari lemahnya optimalisasi tujuan pembangunan, ketidakterpaduan sistem komunikasi dan koordinasi, hingga tekanan sosial-ekonomi yang memengaruhi perilaku masyarakat. Meskipun pemerintah desa telah berupaya menyediakan ruang partisipasi seperti sosialisasi program dan musyawarah desa, efektivitasnya masih rendah karena penyampaian informasi kurang merata, keterlibatan warga tidak merata, serta dominasi tokoh tertentu yang membuat masyarakat merasa pendapatnya kurang dihargai. Kondisi ini sejalan dengan keterbatasan aparatur dalam menerapkan model optimasi tujuan secara ideal, terutama dalam hal perumusan tujuan berbasis data, evaluasi program, dan penyelarasan antara target pembangunan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dari perspektif sistem, rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa komponen-komponen dalam sistem pembangunan desa belum saling mendukung secara harmonis. Hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, jaringan sosial, nilai budaya, serta lingkungan ekonomi belum dikelola secara terpadu. Akibatnya, mekanisme komunikasi tidak berjalan efektif, kepercayaan masyarakat menurun, dan apatisme semakin meluas. Faktor tekanan pada perilaku masyarakat, seperti kesibukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pengaruh sosial, serta pengalaman buruk sebelumnya terkait partisipasi yang tidak dihargai, semakin memperlemah motivasi warga untuk terlibat aktif dalam pembangunan desa.

Secara keseluruhan, permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Muara Sungai tidak dapat dipandang sederhana, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor struktural, sistemik, dan psikologis. Upaya peningkatan partisipasi memerlukan strategi komprehensif, mulai dari peningkatan kualitas komunikasi pemerintah desa, penciptaan ruang partisipasi inklusif, penguatan kapasitas analitis aparatur, hingga pemberian penghargaan terhadap kontribusi warga untuk membangun pengalaman partisipasi yang positif. Dengan penguatan ini, diharapkan proses pembangunan di Desa Muara Sungai dapat berjalan lebih efektif, partisipatif, serta mampu mencapai tujuan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

Afdal, A. A. M., Syam, A. A., Herman, H., & Sumardi, S. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanah Towa. *Journal of Government Insight*, 3(1), 315-322.

Andreeyan, R. (2014). Studi tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan sambutan kecamatan sambutan kota samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(4), 1938-1951.

Azan, A. S., Yanti, F., & Mukmin, H. (2025). Peran Pemerintah Desa Way Huwi Kabupaten Lampung Selatan Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Melalui Program Ketahanan Pangan. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 217-237.

Hasanah, S., Ibrahim, I., Supriyadi, A., & Rejeki, S. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Narkoba Melalui Penyuluhan Hukum Di Desa Juru Mapin Kecamatan Buer Sumbawa. *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(3), 834-838.

Hasmiati, H., Massyat, M., & Yuyun, S. (2021, November). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata di Desa Kayuangan untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). In *Journal Pegguruang: Conference Series* (Vol. 3, No. 2, pp. 866-874).

Hermawan, E., Pebriyani, D., Julianty, D. N., Safitri, F., & Laksono, G. T. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tirtawangunan Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 191-198.

Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29-40.

Irmansyah, I., Mustafa, S. W., & Hamid, R. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Dana Desa terhadap PemYazid, Y., & Alhidayatillah, N. (2017). bangunan Infrastruktur. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(2), 1086-1095.

Kast, F. E., & Rosenzweig, J. E. (1972). General systems theory: Applications for organization and management. *Academy of management journal*, 15(4), 447-465.

Nugraha, B. (2022). Pengembangan uji statistik: Implementasi metode regresi linier berganda dengan pertimbangan uji asumsi klasik. *Pradina Pustaka*.

Nurhayati, N., Wijaya, M. H., & Minan, J. (2024). Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kadujangkung Kecamatan Mekarjaya. *TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora*, 2(1), 223-230.

Nurjanah, N., & Rijali, S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Drainase Jalan Ditinjau dari Aspek Tenaga di Desa Catur Karya Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *JAPB*, 4(2), 821-833.

-
- Oakley, P. (1991). The concept of participation in development. *Landscape and urban planning*, 20(1-3), 115-122.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, 2(2), 210-229.
- Putri, B. Y., Priyanti, E., & Febriantini, K. (2023). Efektifitas Pemerintahan Desa Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat di Desa Karangbaru Kecamatan Cikarang Utara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 139-144.
- Purnamasari, H., Yulyana, E., & Ramdani, R. (2016). Efektivitas pengelolaan badan usaha milik desa (bum desa) berbasis ekonomi kerakyatan di desa warungbambu kecamatan karawang timur kabupaten karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 1(2), 31-31.
- Ramadhona, M., & Sahuri, C. (2017). Efektivitas Disiplin Pegawai di Sekertariat Daerah Kota Pekanbaru (*Doctoral dissertation, Riau University*).
- Robbins, S. P., Judge, T. A., & Vohra, N. (2019). Organizational behaviour by pearson 18e. *Pearson Education India*.
- Salimi, A. A. (2024). Implementasi Tugas dan Fungsi Kepala Dusun Pserspekstif PERMENDAGRI Nomor 84 Tahun 2015 dan Fiqh Siyasah (*Doctoral dissertation, Iain Salatiga*).
- Seddon, J. (2008). Systems thinking in the public sector. *Triarchy Press*.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295-302.
- Sumbawati, N. K., Syafruddin, S., & Gunawan, N. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa DI Desa Brang Kolong Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 9(1), 26-32.
- Yazid, Y., & Alhidayatillah, N. (2017). Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan. *Jurnal Risalah*, 28(1), 1-9.
- Yuliyanto, I. M., & Winarni, A. T. (2022). Partisipasi Masyarakat pada Program Jogo Tonggo di Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 63-68.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait*. Visimedia.
-